



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PANGKALPINANG**

**TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

**RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2025**

**PANGKALPINANG  
TAHUN 2024**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang tertuang dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Disamping itu dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang akan dijadikan pedoman Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 27 ayat 1 mengamanatkan bahwa PD menyusun Renja-SKPD yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

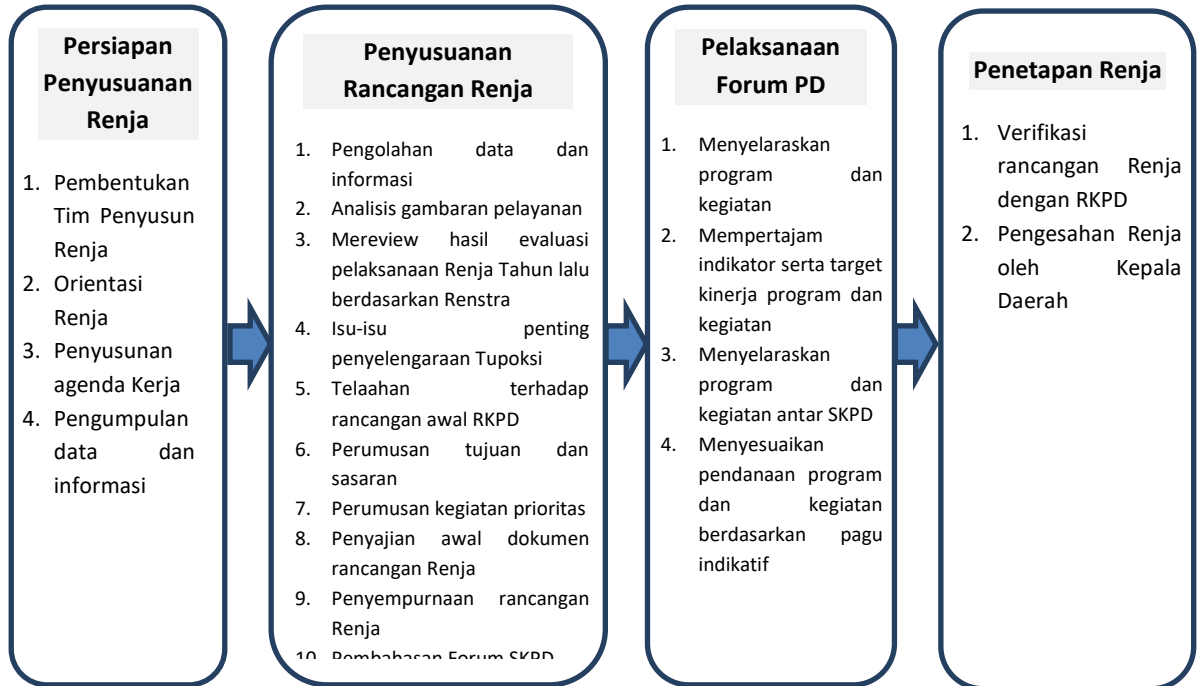
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta prediksi masalah yang akan dihadapi. Selain itu Renja ini juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi bahan utama RKPD serta prakiraananggaran yang dibutuhkan. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Kemudian proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan Renja dengan melalui dua tahap yaitu perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja, setelah kedua tahapan tersebut dilaksanakan forum Perangkat Daerah sebagai sarana untuk memfasilitasi penyampaian usulan baik dari Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rancangan kebijakan yang akan diakomodir ke dalam Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah keseluruhan proses tersebut dilaksanakan, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kolektif dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

Gambar 1.1.  
Tahapan Penyusunan Renja



## 1.2. Landasan Hukum

Dasar dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

1. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun anggaran program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

##### **BAB I      Pendahuluan**

Pada bagian ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan daftar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

##### **BAB II     Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun n-2 sampai dengan triwulan IV Tahun 2023.

##### **BAB III    Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 dan dukungan strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Kebijakan Nasional.

#### BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

#### BAB V Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN 2023**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tahun 2023 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2024 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih belum ada. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra Perangkat Daerah (n-1 dan n-2), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga Perangkat daerah dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Secara umum capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan walaupun terjadi rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2023 urusan Koperasi dan UKM melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja langsung pada APBD induk sebesar APBD induk sebesar Rp 19.664.395.734 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 24.308.113.330,- (penambahan sebesar Rp 4.643.717.596,-). Realisasi serapan anggaran belanja sebesar 22.669.674.764 atau 93,26 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.638.438.566 atau 6,74%. Untuk pendapatan asli daerah, target anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp170.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 62.100.000 atau 36,53%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			6	7	11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80		12.513.317.858		3.810.151.143	20	12.060.371.576	25	96,38	18.271.430.859			
		Survei Kepuasan Pelayanan Internal		90				22		24,4						
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		13 Dok		65.971.200		27.846.205	-	65.117.806	98,71		103.152.600			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		6 Dok		49.971.200		21.950.605	-	49.443.716	98,94		71.804.420			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah			7 Dok	16.000.000		5.895.600	-	15.674.090				31.348.180		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan PD tepat waktu			2 Laporan	<b>7.954.340.508</b>		<b>1.446.337.778</b>	-	7.755.884.961		97,51		10.957.502.023		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			55 Orang	7.954.340.508		1.446.337.778		7.755.884.961		97,51		10.957.502.023		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai yang meningkat Pengetahuannya			4 orang	<b>110.750.000</b>		<b>Rp27.070.816</b>	-	110.092.423				140.984.846		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			97 Orang	79.750.000		<b>0</b>		79.200.000				79.200.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang	31.000.000		27070816		30.892.423				61.784.846		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan administrasi umum PD			9 paket	<b>939.360.400</b>		<b>398.167.317</b>	-	882.199.363		93,91		1.453.223.818		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	47.159.500		11.033.000		47.137.200				78.582.600		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	65.071.500		13.550.300		64.852.138		99,66		96.293.088		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 paket	23.077.900		5.319.900		22.824.200		98,90		35.092.599		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	128.963.200		40.116.100		128.962.980		100,00		199.831.680		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dok	12.660.000		1.400.000		8.785.000						
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 paket	70.532.700		15.369.500		70.161.000		99,47		105.632.099		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Lap	71.500.000		54.616.780		69.731.280		97,53		131.221.658		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Lap	470.400.000		222.677.737		470.149.267		99,95		761.650.298		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dok	49.995.600		34.084.000		34.084.000				68.168.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
										-				-		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8 buah	1.172.521.800		1.045.624.496	-	1.094.894.496				2.169.788.992		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								-		-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan				806.863.800		696.129.500		745.399.500				1.470.799.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				365.658.000		349.494.996		349.494.996				698.989.992		
										-				-		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			4 jenis	1.645.615.750		466.641.056		1.588.074.902		96,50		2.433.782.872		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.010.000		3.680.562		13.427.562		89,46		20.218.213		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				198.005.750		39.560.494		158.297.340		79,95		244.364.731		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								4.050.000				5.800.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.432.600.000		423.400.000		1.412.300.000		98,58		2.163.400.099		
														-		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis BMD yang dipelihara			3 jenis	624.758.200		398.463.475		564.107.625		90,29		1.012.996.090		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				163.227.200		54.675.200		160.279.350		98,19		251.034.548		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				342.461.000		288.383.275		291.883.275		-				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				103.070.000		46.905.000		96.015.000		93,16		153.765.093		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16.000.000		8.500.000		15.930.000				24.430.000		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											25	96,38		18.271.430.859		
Predikat Kinerja												R		Rp -		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPT BALKOP)</b>	Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DKUKM)				198.483.020		45.442.017		167.927.821		84,61		266.961.964		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT Balkop)</b>	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan				115.223.200		28.258.766		109.322.067		94,88		177.358.897		
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5.000.000		-		4.992.500		99,85		8.295.100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45.164.300		7.448.376		40.378.988		89,40		64.401.833		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				11.099.500		1.644.000		11.095.600		99,96		15.923.700		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.000.000		1.750.800		1.750.800				3.501.600		
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				960.000		-		240.000		25,00		240.025		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				24.999.400		9.889.800		24.995.400		99,98		39.749.400		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-								-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.000.000			7.525.790			99,50		45.247.657		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang tersedia				<b>83.259.820</b>			<b>17.183.251</b>			70,39		89.603.147		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				<b>4.000.000</b>			-			39,50		1.580.040		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				69.259.820		11.883.251		51.725.754		74,68		77.423.152			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10.000.000		5.300.000		5.300.000				10.600.000			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													84,61		266.961.963,61		
Predikat Kinerja													SR		Rp -		
	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi				39.999.800		700.000		31.464.700		78,66		32.849.779			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi			5 kopersi	39.999.800		700.000		31.464.700		78,66		32.849.779		
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				39.999.800		700.000		31.464.700		78,66		32.849.779		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												78,66		32.849.778,66		
Predikat Kinerja												T		Rp -		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Persentase Koperasi yang diawasi			0,63	99.746.000		7.195.900		91.250.660		91,48				
	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			7 Koperasi	90.746.000		5.380.500	0	83.136.860		91,61				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat				24.781.000		780.500		20.443.500		82,50				
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				65.965.000		4.600.000		62.693.360		95,04		83.861.275		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				<b>9.000.000</b>		1.815.400		8.113.800		90,15		11.409.290		
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat				9.000.000		1.815.400		8.113.800		90,15		11.409.290		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												<b>91,48</b>		<b>0</b>		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja											T	Rp				
	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	Persentase Koperasi yang sehat			0,45	73.999.500		57.536.500		Rp67.490.700		91,20				
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			5 Koperasi	73.999.500		57.536.500	-	67.490.700		91,20				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				18.999.700		3.800.100		13.754.300		72,39				
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan				54.999.800		53.736.400		53.736.400		97,70				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												91,20		0		
Predikat Kinerja												SR		Rp -		
	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	Persentase SDM KUKM yang bersertifikat			90	2.981.212.800		1.003.899.317		2.895.243.692		97,12 %		4.649.243.938		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih			740 orang	2.981.212.800		1.003.899.317	0	2.895.243.692		97,12		4.649.244.034		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian				2.981.212.800		1.003.899.317		2.895.243.692		97,12		4.649.244.034		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											1,06	0,971163		4.649.243.938		
Predikat Kinerja												SR		Rp -		
	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	Persentase Koperasi yang diberdayakan			1,44	346.761.500		124.049.800		331.625.600	4,86	95,64 %		571.920.101		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pembiayaan/Kemitraan/sarana prasarana			5 koperasi	346.761.500		124.049.800	0	331.625.600		95,64		571.920.196		
	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha				172.122.200		56.226.900		168.606.100		97,96		308.578.398		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi Usaha				114.239.300		37.279.200		108.621.400		95,08		156.340.695		
	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				60.400.000		30.543.700		58.538.100		96,92		111.141.297		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												16,5		571.920.101		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								1793974498								
Predikat Kinerja												SR		Rp		
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang diberdayakan			0,25	2.781.997.092		925.937.880		2.675.100.095	12	96,16		4.960.688.451		
	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah pemuktahiran Pendataan			1 laporan	2.781.997.092		925.937.880		2.675.100.095		96,16		4.960.688.451		
		Jumlah UMKM yang dibina dan Didampingi			11 Kali											

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				926.181.692		332.599.125		881.125.597		95,14		1.636.116.947		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				1.855.815.400		593.338.755		1.793.974.498		96,67		3.324.571.600		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												96,16		4.960.688.451		
Predikat Kinerja												SR				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	Persentase Usaha Kecil yang dikembangkan usahanya			0,11	5.278.595.760		3.245.888.582		4.314.622.218		81,74		7.902.720.233		
	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah</b>	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah			30 unit	5.278.595.760		3.245.888.582	0	4.314.622.218		81,74		7.902.720.233		
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				5.049.952.860		3.113.157.303		4.160.924.619		82,40		7.595.325.035		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	6		7		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6 + 12		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				228.642.900		132.731.279		60.493.100		26,46		60.493.100		
						24.314.113.330				22.635.097.062		81,74		36.655.815.324		
											ST	ST				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												93,26%				
Predikat Kinerja												ST	ST			
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Inisiatif, kreatif dan kerjasama tim																
Faktor Penghambat Pecapaian Kinerja : Tidak ada hambatan																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan penyesuaian dan kegiatan sesuai dengan rencana																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Penyusunan perencanaan dengan baik dan mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal																

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM s/d Tahun 2023, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang capaian kerjanya rendah adalah

a) Program Pengembangan UMKM;

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.278.595.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.314.622.218 atau 81,74 %.

2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terlaksana, dengan total anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 24.308.113.330,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi dan belanja Modal, terealisasi sebesar Rp. 22.669.674.764,- atau sebesar 93,26 %.

3. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

Program Pengembangan UMKM yang realisasinya rendah yaitu sebesar 81,74 % karena adanya tambahan anggaran melalui dana DID (Dana Insentif daerah) sesuai dengan PMK No 170/PMK/2022 tentang Dana insentif Daerah dengan peruntukan tambahan Program Pengembangan sebesar Rp. 3.747.788.460,-. Anggaran DID ini tidak terserap secara maksimal karena pelaksanaannya yang terlambat di triwulan 4 tahun 2023.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, yaitu

Dalam upaya untuk meminimalisir realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam program/kegiatan, maka di butuhkan upaya sebagai berikut:

a) Penetapan target berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar target dapat tercapai;

- b) Pelaksanaan program/kegiatan agar tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan yang ditetapkan dalam DPPA;
- c) Pengesahan DPPA diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tupoksi Perangkat Daerah**

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, dapat diidentifikasi permasalahan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UMKM;
- b. Terbatasnya kemampuan wirausaha SDM Koperasi dan UMKM;
- c. Terbatasnya jaringan usaha baik UMKM maupun koperasi;
- d. Rendahnya kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber permodalan;
- e. Belum optimalnya kemampuan desain *packaging*;
- f. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM;
- g. Keterbatasan dana pembinaan dan pengembangan KUMKM pada kabupaten/kota sehingga sinergitas pembinaan dan pengembangan KUMKM yg dilakukan Perangkat Daerah Provinsi kurang maksimal;
- h. Terbatasnya calon eksportir dan promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
- i. Organisasi PKL belum terorganisir secara formal;
- j. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
- k. Belum tersedia dan terkelolanya data dan informasi mengenai KUMKM yang akurat untuk mendukung proses pembinaan dan pengembangan;
- l. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

#### **A. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

##### 1. Tantangan

Tantangan (*treats*) dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Persaingan yang semakin ketat bagi pelaku usaha (UMKM) dan Koperasi dengan masuknya produk-produk dari pasar global dengan harga dan kualitas yang kompetitif.
- b. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional.
- c. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif.
- d. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
- e. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM.

##### 2. Peluang

Peluang-peluang dalam meningkatkan pelayanan PD sebagai berikut :

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

- a. Pasar dalam dan luar negeri yang terbuka bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
- b. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
- c. Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Strategis.
- d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Destinasi Wisata Nasional.
- e. Mayoritas pelaku usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**B. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Sampai saat ini secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan sektor pertambangan dan sektor pertanian, sekitar 80% ekspor dikuasai oleh komoditas Timah, dan sekitar 20% dari komoditas pertanian. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Bangka Belitung kurang baik sehingga Pemerintah daerah berupaya melakukan transformasi ekonomi dari komoditas timah ke pertanian, perikanan, pariwisata dan perdagangan. Transformasi ini berjalan sangat lambat, karena sejauh ini baru Kabupaten Belitung yang berhasil mengangkat sector pariwisata menjadi sector unggulan mereka, dimana promosi pariwisata Kabupaten Belitung sudah diakui secara Nasional melalui KEK Tanjung Kelayang dan secara internasional melalui geopark Belitung yang diakui oleh UNESCO. Keberhasilan Kabupaten Belitung belum diikuti oleh Kabupaten lainnya, walaupun masing-masing Kabupaten sudah menunjukkan sector-sektor unggulan yang akan mereka angkat sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan daerah, seperti Kabupaten Bangka Selatan yang mengangkat sector pertanian melalui pengembangan komoditas lada (*pepper*), yang pada masa dulu sempat menjadi komoditas unggulan dan dikenal dunia dengan *Muntok white pepper*. Namun karena kurangnya pengembangan produk dan distribution cains yang sulit diatasi menyebabkan komoditas ini sulit bersaing dengan pasar di dunia, yang pada masa sekarang sudah memiliki banyak saingan dari negara penghasil lada seperti Vietnam. Selain mengangkat sector unggulan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu solusi yang bagus dalam melaksanakan transformasi ekonomi, karena dengan pengembangan sector UKM dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peluang untuk pengembangan UKM sangat besar, karena secara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat mendukung dengan memberi kemudahan dalam perijinan, memberikan banyak kesempatan untuk peningkatan skil dan ketrampilan melalui pelatihan UKM,

*Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025*

memberikan kemudahan permodalan melalui KUR, memberikan bantuan peralatan dan prasarana bagi Usaha kecil dan dalam hal pemasaran pemerintah juga memberikan kemudahan melalui promosi atau pameran.

Potensi lainnya berupa pelaku ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah yang relatif bertambah setiap tahunnya namun belum tertangani secara optimal. Terutama sektor informal. Sektor informal merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu strategis ini kami tentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dan berdasarkan isu nasional dimana tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang cenderung meningkat pada dua tahun terakhir pada saat pasca pandemic Covid-19 atau new normal dan ditambah lagi masalah inflasi yang semakin kuat menerpa tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dari isu strategis ini kami mencoba menjabarkan permasalahan yang dihadapi khususnya pada sector koperasi dan UKM antara lain:

- a. Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;
- b. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
- c. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;
- d. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
- e. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;
- f. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
- g. Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;
- h. Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
- i. Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;
- j. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
- k. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;

- I. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai urusan Dinas Koperasi dan UKM.

Rancangan awal RKPD yang telah disusun merupakan kompilasi dari usulan program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah dengan mendasarkan pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dan program kegiatan tahun yang lalu. Sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam pada Renja Dinas Koperasi dan UKM dan dengan melakukan sinkronisasi terhadap urusan terkait, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya. Reviu dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Secara lengkap reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel.2.3**

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perangkat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				28.229.282.032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				28.229.282.032	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)	Nilai Sakip PD	81,5		17.791.469.732	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)	Nilai Sakip PD	81,5		17.791.469.732	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	13	Dokumen	125.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	13	Dokumen	125.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	100.000.000	

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7	Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7	Dokumen	25.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	4	Dok	9.087.186.2 84	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	4	Dok	9.087.186.2 84	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang	9.087.186.2 84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang	9.087.186.2 84	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	1	Dok	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	1	Dok	50.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	50.000.000	

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perangkat Daerah	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	1	Paket	969.887.735	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	1	Paket	969.887.735
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	57.737.925	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	57.737.925
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	141.922.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	141.922.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	36.744.855	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	36.744.855
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	143.844.015	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	143.844.015
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	paket	13.545.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	paket	13.545.000

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	104.893.740	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	104.893.740
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	46.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	46.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	425.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	425.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang tersedia	1	Paket	5.045.487.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang tersedia	1	Paket	5.045.487.600
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	30.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	562.487.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	562.487.600
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	4.453.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	4.453.000.000

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang tersedia	1	laporan	1.830.860.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang tersedia	1	laporan	1.830.860.13
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	23.284.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	23.284.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	329.931.125	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	329.931.125
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Balatkop)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	7.344.488	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Balatkop)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	7.344.488
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	1.470.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	1.470.300.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5	laporan	683.048.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5	laporan	683.048.000

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	56.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	56.700.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	210.204.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	210.204.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	286.484.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	286.484.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	129.660.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	129.660.000	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	2	persen	50.000.000	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	2	persen	50.000.000	

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perangkat Daerah	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	2	ijin usaha	50.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	2	ijin usaha	50.000.000
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	2	Koperasi	50.000.000	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	2	Koperasi	50.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20	persen	75.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20	persen	75.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	20	Koperasi	50.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	20	Koperasi	50.000.000

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	Daerah Provinsi	Daerah Provinsi				Daerah Provinsi	Daerah Provinsi				
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20	Dokumen	50.000.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20	Dokumen	50.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	13	Koperasi	25.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	13	Koperasi	25.000.000	
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	13	KSP	25.000.000	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	13	KSP	25.000.000	

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai	10	persen	80.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai	10	persen	80.000.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	jenis	80.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	jenis	80.000.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15	unit usaha	80.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15	unit usaha	80.000.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi, UKM yang bersertifikat	95	persen	3.495.000.0 00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi, UKM yang bersertifikat	95	persen	3.495.000.0 00
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	50	orang	3.495.000.0 00	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	50	orang	3.495.000.0 00

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	750	orang	3.495.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	750	orang	3.495.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	5	persen	482.238.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	5	persen	482.238.200
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9	Koperasi	482.238.200	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9	Koperasi	482.238.200
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5	Unit Usaha	100.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5	Unit Usaha	100.000.000

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	5	Unit Usaha	182.238.200	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	5	Unit Usaha	182.238.200	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	5	Keluarga	100.000.000	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	5	Keluarga	100.000.000	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	5	Koperasi	100.000.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	5	Koperasi	100.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	3,5	persen	2.530.275.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	3,5	persen	2.530.275.800	

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemutakhiran data dan penguatan kelembagaan UMKM	1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	2.530.275.800	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemutakhiran data dan penguatan kelembagaan UMKM	1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	2.530.275.800	
		Jumlah UMKM yang dibina dan Didampingi	840	UMkM			Jumlah UMKM yang dibina dan Didampingi	840	UMkM		
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	700	unit usaha	960.985.500	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	700	unit usaha	960.985.500	

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	84 0	Orang	215.490.30 0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	84 0	Orang	215.490.30 0	
	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	35	Unit Usaha	200.000.00 0	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	35	Unit Usaha	200.000.00 0	
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	14 0	Unit Usaha	100.000.00 0	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	14 0	Unit Usaha	100.000.00 0	
	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	70 0	Unit Usaha	230.000.00 0	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	70 0	Unit Usaha	230.000.00 0	
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	11 5	Orang	120.000.00 0	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	11 5	Orang	120.000.00 0	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	40	Unit Usaha	100.000.00 0	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	40	Unit Usaha	100.000.00 0	

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah	
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	50	Unit Usaha	225.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	50	Unit Usaha	225.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	35	Unit Usaha	353.800.000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	35	Unit Usaha	353.800.000
	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	300	Unit Usaha	25.000.000	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	300	Unit Usaha	25.000.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang diberdayakan</b>	<b>1,2</b>	<b>persen</b>	<b>3.725.298.300</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang diberdayakan</b>	<b>1,2</b>	<b>persen</b>	<b>3.725.298.300</b>
	Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	3	unit usaha	3.725.298.300	Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	3	unit usaha	3.725.298.300
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	559	unit usaha	2.715.298.300	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	559	unit usaha	2.715.298.300
	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	7	Unit Usaha	300.000.000	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	7	Unit Usaha	300.000.000

No	RKPD 2025				RENJA 2025				Perang kat Daerah		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Indikatif 2025	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	5	Lembaga	110.000.000	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	5	Lembaga	110.000.000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	225	Orang	400.000.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	225	Orang	400.000.000	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	7	Unit Usaha	200.000.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	7	Unit Usaha	200.000.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan melalui Pokir dan Usulan Masyarakat**

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum PD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UKM dalam Renja tahun 2022, namun sebagian belum dapat terakomodir karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran. Perencanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM, mendasar pada :

- a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas;
- b. Usulan masyarakat langsung;
- c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan Dinas Koperasi dan UKM adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel berikut :

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan melalui POKIR DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2024

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI SKPD
120	27-02-2024	HELLYANA, SH	Terbatasnya sarana dan prasarana peningkatan kualitas produk dan standarisasi	Keterbatasan alat produksi kerupuk ikan, cumi dll	Desa Air Saga, Provinsi Bangka Belitung	Tahun 2025 dianggarkan bantuan peralatan, mohon disampaikan Nama, Jenis, Spesifikasi peralatan yang dibutuhkan
121	27-02-2024	HELLYANA, SH	Terbatasnya sarana dan prasarana peningkatan kualitas produk dan standarisasi	Keterbatasan alat produksi ayam potong	Desa Tanjung Rusa, Provinsi Bangka Belitung	Tahun 2025 dianggarkan bantuan peralatan, mohon disampaikan Nama, Jenis, Spesifikasi peralatan yang dibutuhkan
156	27-02-2024	MANSAH	Terbatasnya standarisasi produk, akses permodalan dan pemasaran	Masih sedkinta jaringan untuk pengembangan UMKM yang dimiliki oleh masyarakat	Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Provinsi Bangka Belitung	Digitalisasi/UMKM onboarding sebagai salah satu solusi pengembangan jaringan pemasaran namun terkendala sinyal/jaringan internet di desa pangkal beras
161	27-02-2024	MANSAH	Perlunya konektifitas baik dalam proses produksi dan pemasaran	menumpuknya jumlah atap nipah yang diproduksi oleh masyarakat	Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Provinsi Bangka Belitung	membuka jaringan ke PHRI, Cafe2, rumah makan, pemancingan, dll

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI SKPD
209	27-02-2024	Ir. HENDRIYANSEN	Belum semua UKM dapat mengakses permodalan	Masih ada masyarakat yang belum mendapat bantuan modal UMKM dan kurangnya alat produksi	Jalan Delima I Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Provinsi Bangka Belitung	Diupayakan ada subsidi bunga KUR melalui APBD 2025
280	27-02-2024	DODY KUSDIAN, ST., MH	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Mengusulkan pemberian bantuan bagi pelaku UMKM baik alat usaha maupun modal usaha beberapa UMKM yang ada di Pangkalpinang	Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Tahun 2025 dianggarkan bantuan peralatan, mohon disampaikan Nama, Jenis, Spesifikasi peralatan yang dibutuhkan
284	27-02-2024	DODY KUSDIAN, ST., MH	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Menumbuhkann jiwa wirausaha sehinga mengusulkan untuk mengadakan pelatihan bagi wirausahawan muda	Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Pelatihan bagi wirausaha muda dilaksanakan oleh UPTD Balatkop. Pendampingan oleh konsultan PLUT terkendala SDM dan SD anggaran mengingat PLUT belum berbentuk UPTD sehingga anggaran operasional minim
297	27-02-2024	Ir. HENDRIYANSEN	Belum semua UKM dapat mengakses permodalan	Masyarakat keberatan dengan adanya jaminan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)	Jalan Delima I Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Provinsi Bangka Belitung	mengoptimalkan peran Jamkrida serta mengupayakan ada subsidi bunga KUR melalui APBD 2025

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI SKPD
345	27-02-2024	DODY KUSDIAN, ST., MH	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Memberikan usulan untuk kemudahan dalam mengurus administrasi pembuatan NIB	Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Konsultan PLUT bekerjasama dengan Kelurahan/Desa dalam pembuatan NIB
348	27-02-2024	DODY KUSDIAN, ST., MH	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Terkait dengan marketing yang memang merupakan bagian terpenting dalam usaha, maka diharapkan bantuan untuk membantu pemasaran usaha bagi pelaku usaha	Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	konsultan PLUT mendampingi UMKM untuk bisa berjualan di Medsos. Namun karena tidak ada admin khusus yang mengelola medsos pelaku UMKM maka order potensial sering terlewat
423	27-02-2024	BELIADI, S.IP	Belum semua UKM dapat mengakses permodalan	Masyarakat membutuhkan modal bantuan usaha	Jl.Raya Gantung-Manggar desa selingsing kecamatan gantung, Provinsi Bangka Belitung	Diupayakan ada subsidi bunga KUR melalui APBD 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menganut prinsip *money follows program* dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan draft Rancangan Renja 2025 ini disusun Rancangan RKP 2024 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Program kegiatan Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah apabila dikaitkan dengan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) adalah:

- Prioritas Nasional (PN): Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

- Program Prioritas (PP): Peningkatan nilai tambah jasa produktif
- Kegiatan Prioritas (KP): Pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
- Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang disentuh adalah: perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas usaha, penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan, penguatan ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & HAKI), pelaksanaan diklat vokasi, peningkatan promosi dan advokasi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Melanjutkan tahun ke 2 masa pemerintahan transisi pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang pada tahun ke 1 (per april tahun 2022) dipimpin oleh Ridwan Djamaluddin selaku Pj Gubernur dan per November 2023 sampai sekarang dipimpin oleh Pj Gubernur Safrizal. Namun Sasaran pembangunan tahun 2025 yang terangkum dalam rancangan awal RKPD 2025 sudah selesai disusun dan telah disampaikan ke perangkat daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat daerah tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut, diatur bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 2023-2026 berpedoman pada RPJPD dengan kepala daerah ditunjuk oleh Pemerintah pusat sebagai pejabat kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2023-2024, sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Sesuai dengan RPJPD, maka pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dengan visi **"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju berwawasan Lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia handal dan Pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera"** dan dengan 5 Misi yaitu :

1. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Untuk tahun 2025, Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mengangkat Tema "**Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sdm Dan Stabilitas Demokrasi**" dengan prioritas pembangunan pada tahun 2024 adalah:

- I. Prioritas Pembangunan Utama
  1. Pembangunan Ekonomi
  2. Pembangunan Lingkungan
  3. Pembangunan SDM
  4. Pembangunan Demokrasi
- II. Prioritas Pembangunan Penunjang
  1. Pembangunan Wilayah
  2. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
  3. Pembangunan Pemerintahan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2025 difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan Utama ke-1 yaitu Pembangunan Ekonomi dan Prioritas Pembangunan Penunjang ke-2 yaitu Pemerataan Pendapatan Masyarakat, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 ditargetkan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni "Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM serta peningkatan kesempatan kerja".

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya "meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM serta peningkatan kesempatan kerja" bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, secara spesifik menjabarkan langkah-langkah pencapaian tujuan menjadi beberapa opsi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil, dan
5. Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM

Secara lebih detail sasaran dari tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM) dengan indicator adalah: Predikat RB Perangkat Daerah (DKUKM) dan sasarannya adalah Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM) dengan indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DKUKM)
2. Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja dengan indicator adalah: 1. Persentase pertumbuhan koperasi; 2. Persentase pertumbuhan UKM; 3. Persentase SDM UKM dan koperasi yang berkualitas dan sasarannya adalah Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja dengan indikator 1. Persentase pertumbuhan koperasi; 2. Persentase pertumbuhan UKM; 3. Persentase SDM UKM dan koperasi yang berkualitas

Hubungan antara visi-misi Kepala Daerah dan tujuan-sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.  
Keterkaitan Visi-Misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Beserta Target Pada Renja Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>RKPD (BAPPEDA)</b>					<b>RENJA PD</b>				
<b>UNIT : Sekretariat (Perencanaan)</b>									
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)
<b>UNIT : BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL</b>									
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	<b>RKPD (BAPPEDA)</b>				<b>RENJA PD</b>				
	<b>UNIT : BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL</b>								
3	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	<b>UNIT : Koperasi</b>								
4	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	<b>UNIT : UPTD BALATKOP UKM</b>								
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di perangkat daerah	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	RKPD (BAPPEDA)				RENJA PD				
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 3.2.  
Target Tujuan dan Sasaran  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

NO	URAIAN TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /	SATUAN	TARGET 2025
		SASARAN		
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai	78.10
	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai	78.10
2	Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	Persen	17,74%
		Persentase pertumbuhan UKM	persen	2,00%
		Persentase SDM KUKM yang Terlatih	Persen	0.390
	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	Persen	17,74%
		Persentase pertumbuhan UKM	persen	2,00%
		Persentase SDM KUKM yang Terlatih	Persen	0.390

### **3.3. Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Selain itu penetapan program dan kegiatan perangkat daerah didasarkan RKP tahun 2023 dan kebijakan nasional seperti seperti capaian *Sustainable development goal's* (SDG's), Pengarusutamaan Gender, dimana setiap perangkat daerah harus mensertakan paling sedikit lima kegiatan daerah yang responsive gender, dukungan terhadap pengentasan kemiskinan dan juga inovasi daerah. Setiap perangkat daerah harus menyiapkan usulan minimal 2 inovasi daerah yang akan dikembangkan pada tahun 2023, dan harus masuk dalam kegiatan tahun 2025.

Daftar usulan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Program dan Kegiatan pada  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9		-10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					28.229.282.032					28.325.000.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)	Nilai Sakip PD		78,05		17.791.469.732	APBD		78,25		16.680.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		13	Dokumen	125.000.000	APBD		13	Dokumen	140.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	6	Dokumen	100.000.000			6	Dokumen	110.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkalpinang	7	Dokumen	25.000.000			1	Dokumen	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		Nilai Survey Kepuasan pelayanan Internal		85,55						86,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan		4	Dok	9.087.186.284	APBD			4	Dok	9.500.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang	53	Orang	9.087.186.284				53	Orang	9.500.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)		1	Dok	50.000.000	APBD			1	Dok	75.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pangkalpinang	20	Orang	50.000.000				20	Orang	75.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		1	Paket	969.887.735	APBD			1	Paket	1.090.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	57.737.925				1	Paket	65.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	141.922.200				12	Paket	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	36.744.855			12	Paket	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	143.844.015			12	Paket	165.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pangkalpinang	1	paket	13.545.000			12	Dokumen	20.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	104.893.740			12	Paket	115.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pangkalpinang	1	laporan	46.200.000			12	laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kab/Kota	1	laporan	425.000.000			12	laporan	450.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang tersedia		1	Paket	5.045.487.600	APBD		1	Paket	3.250.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	Paket	30.000.000			1	Paket	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pangkalpinang	15	Unit	562.487.600			1	Unit	600.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10	Unit	4.453.000.000			4	Unit	2.600.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang tersedia		1	laporan	1.830.860.113	APBD		1	laporan	1.915.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalpinang	1	Laporan	23.284.500			1	Laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Laporan	329.931.125			1	Laporan	350.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Balatkop)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Laporan	7.344.488			1	Laporan	10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	laporan	1.470.300.000				1	laporan	1.525.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia		5	laporan	683.048.000	APBD			5	laporan	710.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkalpinang	1	Unit	56.700.000				6	Unit	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkalpinang	3	Unit	210.204.000				5	Unit	215.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	Unit	286.484.000				3	Unit	300.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangkalpinang	3	Unit	129.660.000				3	Unit	135.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		3	persen	50.000.000	APBD		4	persen	65.000.000	
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	3	ijin usaha	50.000.000			4	ijin usaha	65.000.000	
		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	3	Koperasi	50.000.000			4	Koperasi	65.000.000	
	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		25	persen	75.000.000	APBD		28	persen	90.000.000	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	25	Koperasi	50.000.000			28	Koperasi	60.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	7 Kab/Kota	25	Dokumen	50.000.000			28	Dokumen	60.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	7 Kab/Kota	15	Koperasi	25.000.000			17	Koperasi	30.000.000	
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	7 Kab/Kota	15	KSP	25.000.000			17	KSP	30.000.000	
	5 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai		12	persen	80.000.000	APBD		15	persen	90.000.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	17	jenis	80.000.000			20	jenis	90.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	7 Kab/Kota	17	unit usaha	80.000.000			20	unit usaha	90.000.000
	6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi, UKM yang bersertifikat		95	persen	3.495.000.000	APBD		95	persen	3.525.000.000
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	7 Kab/Kota	50	orang	3.495.000.000			50	orang	3.525.000.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	7 Kab/Kota	750	orang	3.495.000.000			800	orang	3.525.000.000
	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan		7	persen	482.238.200	APBD		10	persen	600.000.000
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	30	Koperasi	482.238.200			40	Koperasi	600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	7 Kab/Kota	10	Unit Usaha	100.000.000			10	Unit Usaha	125.000.000
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	7 Kab/Kota	10	Unit Usaha	182.238.200			10	Unit Usaha	225.000.000
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	7 Kab/Kota	5	Keluarga	100.000.000			10	Keluarga	125.000.000
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	8 Kab/Kota	5	Koperasi	100.000.000			10	Koperasi	125.000.000
	8 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan		3,5	persen	2.530.275.800	APBD		3,5	persen	3.075.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemutakhiran data dan penguatan kelembagaan UMKM	7 Kab/Kota	1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	2.530.275.800			1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	3.075.000.000
		Jumlah UMKM yang dibina dan Didampingi	7 Kab/Kota	840	UMkM				840	UMkM	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	7 Kab/Kota	700	unit usaha	960.985.500			180,184	Unit	1.100.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	7 Kab/Kota	840	Orang	215.490.300			840	Orang	250.000.000
	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	8 Kab/Kota	35	Unit Usaha	200.000.000			35	Unit Usaha	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	9 Kab/Kota	140	Unit Usaha	100.000.000			140	Unit Usaha	150.000.000	
	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	10 Kab/Kota	700	Unit Usaha	230.000.000			700	Unit Usaha	300.000.000	
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	11 Kab/Kota	115	Orang	120.000.000			115	Orang	150.000.000	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	14 Kab/Kota	40	Unit Usaha	100.000.000			40	Unit Usaha	150.000.000	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	15 Kab/Kota	50	Unit Usaha	225.000.000			50	Unit Usaha	275.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	16 Kab/Kota	35	Unit Usaha	353.800.000			35	Unit Usaha	400.000.000	
	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	17 Kab/Kota	300	Unit Usaha	25.000.000			300	Unit Usaha	50.000.000	
	9 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil yang diberdayakan		1,2	persen	3.725.298.300	APBD		1,3	persen	4.200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	7 Kab/Kota	3	unit usaha	3.725.298.300			3	unit	4.200.000.000	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	7 Kab/Kota	559	unit usaha	2.715.298.300			650	unit	2.900.000.000	
		Pengembangan Usaha Kecil		7	Unit Usaha	300.000.000			7	Unit Usaha	400.000.000	
		Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang		5	Lembaga	110.000.000			5	Lembaga	150.000.000	
		Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan		225	Orang	400.000.000			225	Orang	500.000.000	
		Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil		7	Unit Usaha	200.000.000			7	Unit Usaha	250.000.000	



### 3.4. Dukungan Program dan kegiatan pada Kebijakan Nasional

Di Samping melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi dan UKM juga perlu memberi dukungan dan kontribusi terhadap capaian Nasional seperti Pengentasan Kemiskinan, Penurunan angka pengangguran, Pengendalian Inflasi, Sustainable Development Goal's (SDG's), Pengarusutamaan Gender dan Kebijakan Prioritas pembangunan Nasional Lainnya.

#### 1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim, dimana urusan koperasi dan UMKM menjadi salah satu sector yang berkontribusi dan terlibat dalam pengentasan Kemiskinan Ekstrim. Keterlibatan Dinas Koperasi dan UKM dalam pengentasan Kemiskinan ekstrim sifatnya hanya penunjang atau supporting, sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bappeda sebagai kordinator baik dari aspek perencanaan yang sinkron dengan sasaran RPD, maupun dari aspek pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan yang sesuai dengan yang telah ditentukan.

Tabel 3.3.

Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Pengentasan kemiskinan Ekstrim Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan omset Koperasi dan UKM	Program Pengembangan UKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usahamenjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	1,185,766,900	
				Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	319,509,300	
		Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	699,985,500	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
				Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	100,000,000	
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjamkoperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35,999,700	
3	Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Program Pengembangan UKM	KegiatanPengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usahamenjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil	218,062,500	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintasdaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	88,249,900	
4	Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM	Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	173,999,700	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	13,000,000	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	65,800,000	
<b>TOTAL</b>					<b>2,900,373,500</b>	

## 2. Penurunan Angka Pengangguran

Berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dimana tujuan Renstra tahun 2024 adalah Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja dengan mendukung Tujuan Pembangunan Daerah seperti yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah Meningkatnya Angkatan Kerja dengan Indikator Tingkat Pengangguran terbuka.

Tabel 3.4.

Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Penurunan Angka Pengangguran  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan kualitas SDM KUKM melalui pelatihan dan sistem online	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintasdaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3,433,198,192	
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	43,999,700	
		Program Pengembangan UKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	179,905,700	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	215,490,300	
		Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	130,624,200	
				Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	70,262,200	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintasdaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	35,399,500	
<b>TOTAL</b>					<b>4,108,879,792</b>	

### 3. Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu factor penghambat pertumbuhan perekonomian, karena dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya omzet pelaku usaha, sehingga Pemerintah sangat memperhatikan pergerakan dan fluktuasi inflasi. Pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Tim pengendali inflasi yang terdiri dari unsure Pemerintah, Perbankan, Filantropi, media masa, dan akademisi yang bertugas memantau dan mengevaluasi pergerakan inflasi yang terjadi setiap Bulan. Adapun dukungan dari Program Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya untuk pengendalian inflasi, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5.**  
**Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Pengendalian Inflasi**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024**

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan omset Koperasi dan UKM	Program Pengembangan UKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	1,185,766,900	
				Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	319,509,300	
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35,999,700	
3	Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Program Pengembangan UKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil	218,062,500	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	88,249,900	
<b>TOTAL</b>					<b>1,847,588,300</b>	

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Berpedoman pada Pepres Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2025-2035 sebagai manifestasi dari dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Untuk mencapai target yang telah disepakati dalam agenda tersebut, Pemerintah melalui Pepres No 111 Tahun 2022 mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mendukung capaian tersebut. Untuk Urusan Koperasi dan UKM yang menjadi tupoksi Dinas Koperasi dan UKM tergabung dalam Pilar Ekonomi pada Goal 8 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dengan Indikator 1. Persentase Akses UMKM ke layanan keuangan; 2. Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit. Untuk mendukung capaian ini, berikut ini strategi dan program yang akan dilaksanakan:

Tabel 3.6.

Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Program Pengembangan UKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil	218,062,500	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	88,249,900	
2	Meningkatkan kualitas SDM KUKM melalui pelatihan dan sistem online	Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	215,490,300	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	130,624,200	
<b>TOTAL</b>					652,426,900	

Disamping program dan Kegiatan dari pemerintah daerah di atas, ada juga kontribusi yang diberikan oleh stake holder seperti BUMN, Filantropi, termasuk PT Timah, Perbankan (BI, BRI, BNI dan Mandiri) yang memberi kredit usaha Rakyat (KUR) dan juga dari lembaga social seperti Baznaz, Muhammadiyah dan lainnya, yang belum terdata.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Sasaran utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil, meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM. Kelima sasaran ini didukung oleh 6 program yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan dan beberapa pekerjaan. Outcome program yang direncanakan merupakan target yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan:

- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

8. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan:

- 1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Tabel 4.1.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3		4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			28.229.282.032	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)	81,5		17.791.469.732	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	13	Dokumen	125.000.000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	7	Dokumen	25.000.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Dok	9.087.186.284	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang	9.087.186.284	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dok	50.000.000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Paket	969.887.735	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	57.737.925	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	141.922.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	36.744.855	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	143.844.015	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	paket	13.545.000	
	Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	104.893.740	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	46.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	425.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Paket	5.045.487.600	APBD
	Pengadaan Mebel	1	Paket	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Unit	562.487.600	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	Unit	4.453.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	laporan	1.830.860.113	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	23.284.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	329.931.125	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Balatkop)	1	Laporan	7.344.488	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	laporan	1.470.300.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	laporan	683.048.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	56.700.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	210.204.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit	286.484.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	129.660.000	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2	persen	50.000.000	APBD
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	ijin usaha	50.000.000	
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Koperasi	50.000.000	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20	persen	75.000.000	APBD
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20	Koperasi	50.000.000	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20	Dokumen	50.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13	Koperasi	25.000.000	
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13	KSP	25.000.000	
5	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10	persen	80.000.000	APBD
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	jenis	80.000.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	15	unit usaha	80.000.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	95	persen	3.495.000.000	APBD/DAK
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	50	orang	3.495.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	750	orang	3.495.000.000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5	persen	482.238.200	APBD
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9	Koperasi	482.238.200	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	5	Unit Usaha	100.000.000	
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5	Unit Usaha	182.238.200	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5	Keluarga	100.000.000	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5	Koperasi	100.000.000	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3,5	persen	2.530.275.800	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	2.530.275.800	
		840	UMkM		
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	700	unit usaha	960.985.500	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	840	Orang	215.490.300	
	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	35	Unit Usaha	200.000.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	140	Unit Usaha	100.000.000	
	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	700	Unit Usaha	230.000.000	
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	115	Orang	120.000.000	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	40	Unit Usaha	100.000.000	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	50	Unit Usaha	225.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	35	Unit Usaha	353.800.000	
	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	300	Unit Usaha	25.000.000	
9	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	1,2	persen	3.725.298.300	APBD
	Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	3	unit usaha	3.725.298.300	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	559	unit usaha	2.715.298.300	
	Pengembangan Usaha Kecil	7	Unit Usaha	300.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	5	Lembaga	110.000.000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	225	Orang	400.000.000	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	7	Unit Usaha	200.000.000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Penutup**

Pada tahun 2025 tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "Penguatan Perekonomian, SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan"

dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM;
3. Peningkatkan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan;
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat; dan
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Dari kelima prioritas pembangunan daerah ini, ada 2 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, dan Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasikan sinergis baik dengan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 secara efektif dan efisien. Selain itu Renja ini dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2024.

Untuk mendukung realisasi 5 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah tersebut diatas pada tahun anggaran 2025, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 7 program prioritas yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM

Ketujuh program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

## **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dan tahun 2024;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan yang harus dicapai;
5. Memperhatikan keberlanjutan Program (*sustainable development*) yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk memantau dan memonitoring ketercapaian target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan Pengendalian dan evaluasi (dalev) secara konsisten setiap triwulan tahun berjalan terhadap Rencana Kerja terkait kegiatan, target kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Pangkalpinang, Maret 2024

Plt. Kepala Dinas  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Riza Aryani, S.Sos, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19750130 200212 2 006